

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas hidup. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi guna menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan.

Melalui APBN, pemerintah menghimpun berbagai sumber penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk membiayai beragam kebutuhan publik. Penggunaan anggaran tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan program perlindungan sosial, serta pelaksanaan berbagai program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Ramandani & Endang, 2025).

Salah satu komponen utama dalam APBN adalah belanja negara yang memiliki fungsi penting dalam mendorong aktivitas perekonomian. Belanja negara merupakan seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang mengurangi nilai kekayaan bersih negara dalam suatu periode anggaran tertentu. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan,

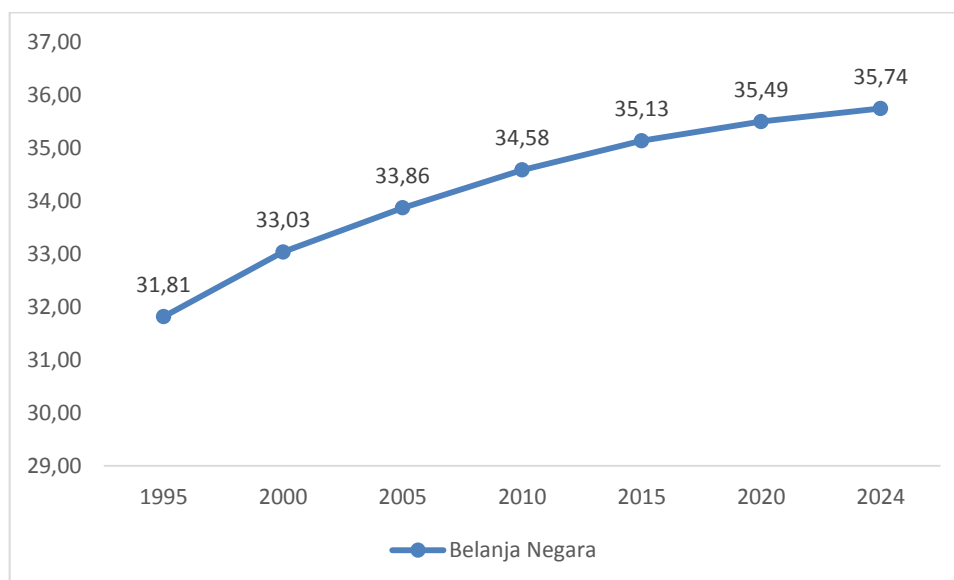
pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, serta berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Walizi, 2025). Oleh karena itu, besarnya belanja negara dapat mencerminkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah.

Dalam menetapkan besaran belanja negara, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam negeri, tetapi juga memperhatikan perkembangan ekonomi global. Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*small open economy*), Indonesia memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan dinamika ekonomi internasional. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan harga komoditas dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, maupun kebijakan moneter negara-negara maju berpotensi memengaruhi penerimaan negara, kebutuhan pembiayaan pemerintah, serta kapasitas fiskal dalam mendukung pembangunan.

Dinamika berbagai indikator ekonomi tersebut mengakibatkan kondisi fiskal pemerintah terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, kebijakan belanja negara perlu disusun secara adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan (Blanchard, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, belanja negara menjadi salah satu indikator yang penting untuk dianalisis karena mencerminkan respons kebijakan fiskal pemerintah terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik yang bersumber dari faktor domestik maupun faktor eksternal. Dengan demikian, pembahasan mengenai

perkembangan belanja negara menjadi relevan untuk memahami dinamika pengelolaan fiskal di Indonesia. Berikut disajikan data perkembangan Belanja Negara Indonesia selama periode penelitian.



Gambar 1. 1 Belanja Negara Ln(Miliar Rupiah)

Sumber: *Badan Pusat Statistik(BPS)*

Berdasarkan Gambar 1.1, perkembangan belanja negara Indonesia selama periode 1995–2024 menunjukkan adanya perubahan yang dinamis dengan pola peningkatan dan penyesuaian pada beberapa periode tertentu. Pada tahun 1995, realisasi belanja negara tercatat sebesar 31,81. Pada periode tersebut, kondisi belanja negara masih relatif terkendali karena perekonomian Indonesia belum mengalami dampak langsung dari krisis keuangan Asia yang mulai terjadi pada tahun 1997.

Memasuki tahun 2000, belanja negara mengalami peningkatan menjadi 33,03. Peningkatan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi setelah terjadinya krisis moneter 1997–1998. Pada masa pemulihan tersebut, pemerintah meningkatkan pengeluaran negara untuk

mendukung proses restrukturisasi sektor perbankan dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi nasional (Kompas.com, 2000).

Pada tahun 2005, belanja negara kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 33,86. Perubahan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak dunia yang mencapai lebih dari US\$60 per barel. Kenaikan harga minyak internasional menyebabkan peningkatan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan energi melalui peningkatan anggaran subsidi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut juga mendorong pemerintah melakukan kebijakan penyesuaian harga BBM untuk menjaga keberlanjutan fiskal (Tempo, 2005).

Selanjutnya, pada tahun 2010, belanja negara meningkat menjadi 34,58. Peningkatan tersebut terjadi karena pemerintah masih melakukan berbagai langkah pemulihan ekonomi setelah dampak krisis keuangan global tahun 2008–2009. Dalam kondisi tersebut, belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan pertumbuhan nasional (Bisnis Indonesia, 2010).

Pada tahun 2015, belanja negara kembali mengalami peningkatan menjadi 35,13. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan fiskal pemerintah yang melakukan pengalihan sebagian anggaran subsidi BBM untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pembangunan berbagai proyek strategis, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bendungan guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (CNN Indonesia, 2015).

Kemudian, pada tahun 2020, belanja negara meningkat menjadi 35,49 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan ekspansi belanja untuk menangani dampak pandemi melalui peningkatan anggaran kesehatan, bantuan sosial, dukungan bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Pada tahun 2024, belanja negara kembali mengalami peningkatan menjadi 35,74. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pengeluaran pemerintah masih dipengaruhi oleh berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun tekanan eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Meskipun demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan berupa tingginya suku bunga global, khususnya kebijakan moneter Amerika Serikat melalui peningkatan suku bunga The Fed, serta ketidakpastian kondisi ekonomi internasional (CNBC Indonesia, 2024).

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat diketahui bahwa perubahan belanja negara Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari perekonomian global. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan APBN agar tetap mampu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan nasional.

Salah satu faktor eksternal yang memiliki keterkaitan dengan perubahan belanja negara adalah harga minyak dunia. Perubahan harga minyak internasional dapat memberikan dampak terhadap pengeluaran pemerintah, terutama melalui

mekanisme subsidi energi dan kebijakan kompensasi harga. Berdasarkan teori *Commodity Price Shock* yang dikemukakan oleh Hamilton (1983), perubahan harga minyak dunia dapat memengaruhi berbagai indikator makroekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, serta kondisi fiskal pemerintah. Ketika harga minyak mengalami peningkatan, biaya penyediaan energi dan kebutuhan subsidi BBM cenderung meningkat sehingga dapat menyebabkan bertambahnya beban pengeluaran pemerintah (Sasmitasiwi & Cahyadin, 2008).

Sebagai negara yang masih membutuhkan impor minyak mentah dan produk BBM untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, Indonesia memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan perkembangan harga minyak di pasar internasional. Kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan biaya pengadaan energi sehingga memberikan tekanan terhadap anggaran pemerintah, terutama apabila kebijakan subsidi dan kompensasi energi tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga domestik.

Sebaliknya, apabila harga minyak dunia mengalami penurunan, tekanan terhadap belanja pemerintah pada sektor energi dapat berkurang. Kondisi tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pembangunan lainnya yang lebih produktif (Sampe, 2023).

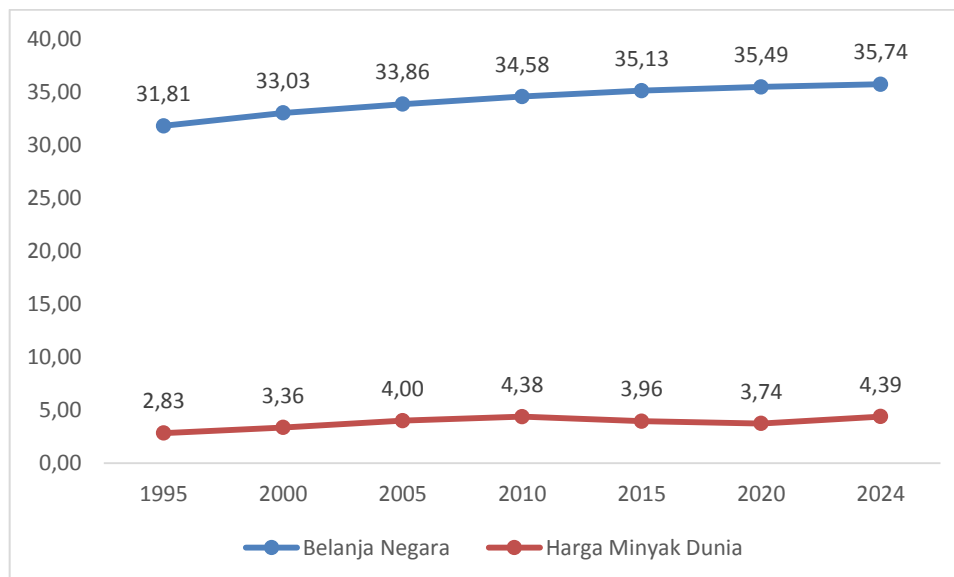
Menurut *International Monetary Fund (IMF)*, perubahan harga komoditas energi, khususnya minyak mentah, menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi fiskal suatu negara, terutama bagi negara berkembang yang memiliki ketergantungan terhadap impor energi atau masih menerapkan kebijakan subsidi energi. Fluktuasi harga minyak dapat memengaruhi kebutuhan

pengeluaran pemerintah serta kapasitas ruang fiskal dalam membiayai program pembangunan (IMF, 2023). Selain itu, *World Bank* menjelaskan bahwa ketidakstabilan harga minyak dunia merupakan salah satu risiko eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal karena berpengaruh terhadap perubahan penerimaan maupun pengeluaran pemerintah, terutama pada sektor energi (*World Bank*, 2024).

Dalam konteks Indonesia, harga minyak dunia memiliki peran strategis terhadap keberlanjutan fiskal dan pengelolaan APBN karena berkaitan dengan subsidi energi, tingkat inflasi, nilai tukar, serta biaya impor minyak dan gas. Ketergantungan terhadap impor minyak menyebabkan peningkatan harga minyak internasional berpotensi meningkatkan biaya penyediaan energi dan memperbesar tekanan terhadap anggaran subsidi pemerintah. Apabila pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi energi, kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan belanja negara atau mempersempit ruang fiskal yang tersedia.

Pengaruh perubahan harga minyak terhadap kondisi fiskal juga terlihat dalam berbagai kajian mengenai risiko APBN. Peningkatan harga minyak dunia hingga kisaran tertentu dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap defisit anggaran apabila tidak diikuti dengan penyesuaian kebijakan fiskal. Untuk menjaga keberlanjutan anggaran, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti efisiensi belanja atau penyesuaian kebijakan subsidi. Dengan demikian, kenaikan harga minyak dunia tidak secara langsung menyebabkan peningkatan belanja negara dalam jumlah yang sama, tetapi lebih berperan dalam

meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi dan berpotensi memperbesar defisit fiskal. Berikut di sajikan data perkembangan harga minyak dunia:



Gambar 1. 2 Belanja Negara Ln(Miliar Rupiah) dan Harga Minyak Brent Ln(US\$/Barel)”

Sumber: *Badan Pusat Statistik & U.S Energy Information Administration,*

Berdasarkan gambar 1.2, perkembangan belanja negara dan pertumbuhan harga minyak dunia di indonesia selama periode 1995–2024 menunjukkan pola pergerakan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1995, belanja negara berada pada angka 31,81, sedangkan pertumbuhan harga minyak dunia tercatat sebesar 2,83. Pada periode tersebut, kondisi pasar minyak internasional masih relatif stabil sehingga dampak terhadap pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan subsidi energi, belum memberikan tekanan yang besar terhadap anggaran negara.

Memasuki tahun 2000, belanja negara meningkat menjadi 33,03, sementara pertumbuhan harga minyak dunia mengalami kenaikan menjadi 3,36. Kondisi tersebut terjadi dalam masa pemulihan ekonomi indonesia setelah krisis

moneter 1997–1998. Peningkatan harga minyak dunia turut memberikan pengaruh terhadap kebutuhan fiskal pemerintah karena meningkatnya biaya penyediaan energi dan kebutuhan anggaran untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional (reuters, 2000).

Pada tahun 2005, belanja negara kembali mengalami peningkatan menjadi 33,86, bersamaan dengan pertumbuhan harga minyak dunia yang mencapai 4,00. Periode tersebut ditandai oleh kenaikan harga minyak mentah *internasional* yang memberikan tekanan terhadap anggaran pemerintah, khususnya melalui peningkatan beban subsidi bahan bakar minyak (bbm). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan harga bbm serta meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi energi dan program kompensasi bagi masyarakat yang terdampak (reuters, 2005).

Selanjutnya, pada tahun 2010, belanja negara meningkat menjadi 34,58, sedangkan pertumbuhan harga minyak dunia mencapai 4,38. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan harga minyak dunia tidak selalu secara langsung menyebabkan perubahan belanja negara dalam arah yang sama. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan pengendalian subsidi energi, perubahan harga minyak internasional tetap memberikan tekanan terhadap pengeluaran pemerintah karena kebutuhan menjaga stabilitas harga energi domestik (kementerian keuangan ri, 2010).

Pada tahun 2015, belanja negara kembali mengalami peningkatan menjadi 35,13, sementara pertumbuhan harga minyak dunia mengalami penurunan menjadi 3,96. Penurunan harga minyak memberikan kesempatan bagi pemerintah

untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja negara, termasuk mengurangi tekanan subsidi energi dan mengalihkan sebagian anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta program ekonomi produktif lainnya (kompas.com, 2015).

Pada tahun 2020, belanja negara meningkat menjadi 35,49, meskipun pertumbuhan harga minyak dunia mengalami penurunan menjadi 3,74. Penurunan harga minyak tersebut terjadi akibat melemahnya aktivitas ekonomi global selama pandemi covid-19. Namun, belanja negara justru mengalami peningkatan karena pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan anggaran kesehatan, bantuan sosial, serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (pen). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan belanja negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga minyak dunia, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan pemerintah dalam menghadapi situasi luar biasa (*extraordinary condition*) (cnbc indonesia, 2020).

Pada tahun 2024, belanja negara meningkat menjadi 35,74, sedangkan pertumbuhan harga minyak dunia berada pada angka 4,39. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan harga minyak dunia tidak selalu menyebabkan peningkatan belanja negara secara langsung. Pemerintah dapat melakukan berbagai penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk pengaturan kembali alokasi belanja dan kebijakan subsidi energi, untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global (reuters, 2024; cnbc indonesia, 2024).

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antara harga minyak dunia dan belanja negara memiliki pola yang tidak selalu searah. Pada periode tertentu, seperti tahun 2005, kenaikan harga minyak dunia mendorong peningkatan belanja negara akibat meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Namun, pada periode lain seperti tahun 2015 dan 2020, perubahan belanja negara lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam merespons kebutuhan pembangunan nasional dan kondisi ekonomi yang terjadi.

Walaupun demikian, harga minyak dunia tetap menjadi salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Perubahan harga minyak internasional dapat memengaruhi besarnya subsidi energi dan kebutuhan pengeluaran pemerintah. Penelitian Mailida et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara harga minyak dunia dan pengeluaran pemerintah di Indonesia, yang berarti perubahan harga minyak dapat memengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan besaran belanja negara.

Sebagai negara yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi, Indonesia menghadapi risiko fiskal ketika terjadi peningkatan harga minyak dunia secara signifikan. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya impor energi, memperbesar beban subsidi BBM, serta memberikan tekanan terhadap inflasi domestik. Hasil penelitian Soesanto et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan harga minyak dunia memiliki pengaruh terhadap kondisi fiskal pemerintah karena dapat meningkatkan tekanan terhadap pengeluaran negara, khususnya pada sektor subsidi energi.

Selain faktor harga minyak dunia, variabel eksternal lain yang dapat memengaruhi belanja negara adalah suku bunga the fed. Suku bunga merupakan tingkat imbal hasil atau biaya yang harus dibayarkan atas penggunaan dana dalam periode tertentu. Dalam sistem moneter amerika serikat, *federal funds rate* (FFR) berfungsi sebagai suku bunga acuan yang memengaruhi kondisi likuiditas global, biaya pinjaman, serta keputusan investasi internasional.

Perubahan federal funds rate dapat memengaruhi pergerakan modal global karena investor akan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengembalian dan risiko investasi antarnegara. Kenaikan tingkat suku bunga di suatu negara dapat meningkatkan daya tarik aset keuangan negara tersebut sehingga mendorong perpindahan modal internasional (*capital flow*) untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi (li, 2018).

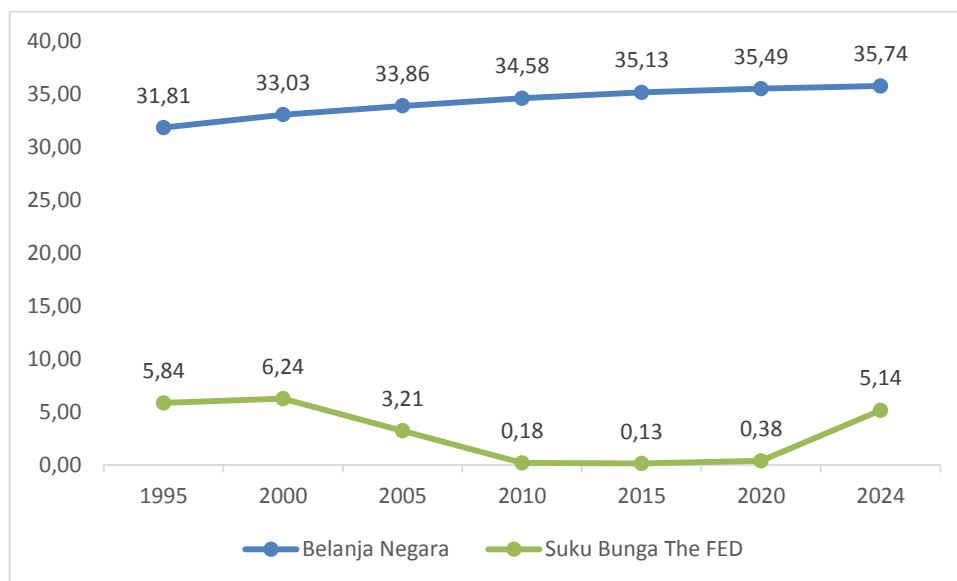
Ketika *the fed* meningkatkan suku bunga, investor global cenderung mengalihkan investasinya ke aset amerika serikat yang dianggap memiliki tingkat keamanan dan imbal hasil lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya *capital outflow* dari negara berkembang, termasuk indonesia, sehingga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Pelemahan nilai tukar rupiah akibat arus modal keluar dapat meningkatkan biaya impor, khususnya pada komoditas energi, serta memperbesar beban pembayaran utang luar negeri pemerintah yang sebagian besar menggunakan denominasi dolar amerika serikat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah apabila peningkatan biaya tidak diimbangi dengan kenaikan penerimaan negara.

Selain melalui jalur nilai tukar, kenaikan suku bunga the fed juga dapat memengaruhi biaya pembiayaan pemerintah. Ketika suku bunga global meningkat, pemerintah indonesia perlu menawarkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi pada surat berharga negara (sbn) agar tetap menarik bagi investor. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang dalam apbn dapat meningkat dan ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas (pratama et al., 2024).

Fenomena tersebut terlihat pada periode pascapandemi ketika the fed menerapkan kebijakan kenaikan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan tekanan inflasi. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap negara berkembang, termasuk indonesia, melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah, peningkatan biaya impor energi, serta meningkatnya kebutuhan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Selain itu, kenaikan suku bunga global juga berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi domestik karena biaya pinjaman meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan suku bunga the fed menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan belanja negara indonesia. Berikut disajikan data mengenai suku bunga *the fed* dan perkembangan belanja negara.



Gambar 1. 3 Belanja Negara Ln(Miliar Rupiah) dan Suku Bunga The Fed (Persen)

Sumber: *Badan Pusat Statistik & FRED*

Berdasarkan gambar 1.3, perkembangan belanja negara dan suku bunga the fed selama periode 1995–2024 menunjukkan pergerakan yang mengalami perubahan cukup dinamis. Belanja negara mengalami tren peningkatan dari 31,81 pada tahun 1995 menjadi 35,74 pada tahun 2024. Sementara itu, suku bunga the fed menunjukkan pola yang berbeda, yaitu mengalami penurunan dari 5,84 persen pada tahun 1995 hingga mencapai tingkat rendah sebesar 0,13 persen pada tahun 2015, kemudian kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 5,14 persen pada tahun 2024.

Pada tahun 1995, belanja negara indonesia tercatat sebesar 31,81, sedangkan suku bunga the fed berada pada tingkat 5,84 persen. Pada periode tersebut, kondisi ekonomi global relatif stabil sehingga perubahan kebijakan moneter amerika serikat belum memberikan dampak yang besar terhadap kondisi

fiskal indonesia. Aktivitas ekonomi domestik masih menjadi faktor utama yang memengaruhi arah kebijakan belanja pemerintah.

Memasuki tahun 2000, belanja negara meningkat menjadi 33,03, sementara suku bunga the fed mengalami kenaikan menjadi 6,24 persen. Peningkatan suku bunga tersebut merupakan bagian dari kebijakan federal reserve dalam merespons kondisi ekonomi amerika serikat yang mengalami pertumbuhan kuat pada akhir 1990-an. Perubahan kebijakan moneter tersebut tidak hanya berdampak pada perekonomian amerika serikat, tetapi juga memengaruhi pergerakan arus modal global, termasuk negara berkembang seperti indonesia (reuters, 2000).

Pada tahun 2005, belanja negara kembali mengalami peningkatan menjadi 33,86, sedangkan suku bunga the fed mengalami penurunan menjadi 3,21 persen. Meskipun tingkat suku bunga global lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, belanja negara tetap meningkat akibat meningkatnya kebutuhan anggaran pemerintah untuk membiayai subsidi energi sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut faktor domestik, khususnya kebijakan fiskal terkait subsidi energi, memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap peningkatan belanja negara dibandingkan perubahan suku bunga global (tempo, 2005).

Selanjutnya, pada tahun 2010, belanja negara meningkat menjadi 34,58, sedangkan suku bunga the fed mengalami penurunan signifikan menjadi 0,18 persen. Kebijakan suku bunga rendah tersebut merupakan respons federal reserve terhadap dampak krisis keuangan global tahun 2008–2009 dengan tujuan

mendorong pemulihan ekonomi melalui peningkatan likuiditas. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan keuangan global yang lebih longgar dan mendorong masuknya aliran modal ke negara berkembang, termasuk indonesia, sehingga membantu menjaga stabilitas ekonomi domestik (federal reserve, 2010).

Pada tahun 2015, belanja negara kembali meningkat menjadi 35,13, sementara suku bunga *the fed* masih berada pada tingkat rendah sebesar 0,13 persen. Kondisi suku bunga global yang rendah memberikan kesempatan bagi pemerintah indonesia untuk memperkuat kebijakan pembangunan melalui peningkatan investasi infrastruktur dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Namun, pada akhir tahun 2015, federal reserve mulai melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan setelah beberapa tahun menerapkan kebijakan moneter yang longgar pascakrisis global (reuters, 2015).

Pada tahun 2020, belanja negara mengalami peningkatan menjadi 35,49, sedangkan suku bunga *the fed* berada pada tingkat 0,38 persen. Tingkat suku bunga yang rendah tersebut merupakan bagian dari kebijakan darurat federal reserve untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19. Pada periode yang sama, pemerintah indonesia meningkatkan pengeluaran negara secara signifikan untuk membiayai kebutuhan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemulihan ekonomi nasional (pen) sebagai upaya mengatasi dampak pandemi (cnbc indonesia, 2020).

Pada tahun 2024, belanja negara meningkat menjadi 35,74, sementara suku bunga *the fed* mengalami kenaikan hingga 5,14 persen. Peningkatan tersebut dilakukan oleh federal reserve sebagai langkah untuk mengendalikan tekanan

inflasi yang tinggi di amerika serikat. Kebijakan tersebut berdampak terhadap perekonomian global melalui penguatan dolar amerika serikat, tekanan terhadap nilai tukar negara berkembang, serta peningkatan biaya pembiayaan pemerintah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal dan mengelola belanja negara secara berkelanjutan (cnbc indonesia, 2024). Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan antara suku bunga the fed dan belanja negara tidak menunjukkan pola hubungan yang selalu searah. Pada beberapa periode, perubahan belanja negara lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti peningkatan subsidi energi pada tahun 2005 dan kebijakan penanganan pandemi pada tahun 2020. Sementara itu, pengaruh kenaikan suku bunga the fed lebih banyak terjadi melalui mekanisme tidak langsung, yaitu melalui perubahan arus modal internasional, nilai tukar, serta biaya pembiayaan pemerintah.

Meskipun demikian, perubahan suku bunga the fed tetap menjadi salah satu faktor eksternal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan fiskal indonesia. Kebijakan moneter amerika serikat dapat memengaruhi kondisi ekonomi domestik melalui perubahan aliran investasi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, peningkatan biaya utang pemerintah, serta perubahan kondisi makroekonomi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kapasitas pemerintah dalam menentukan besaran belanja negara.

Penelitian mailida et al. (2019) menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi global memiliki keterkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Selain itu, penelitian kusumasari & soebagiyo (2024)

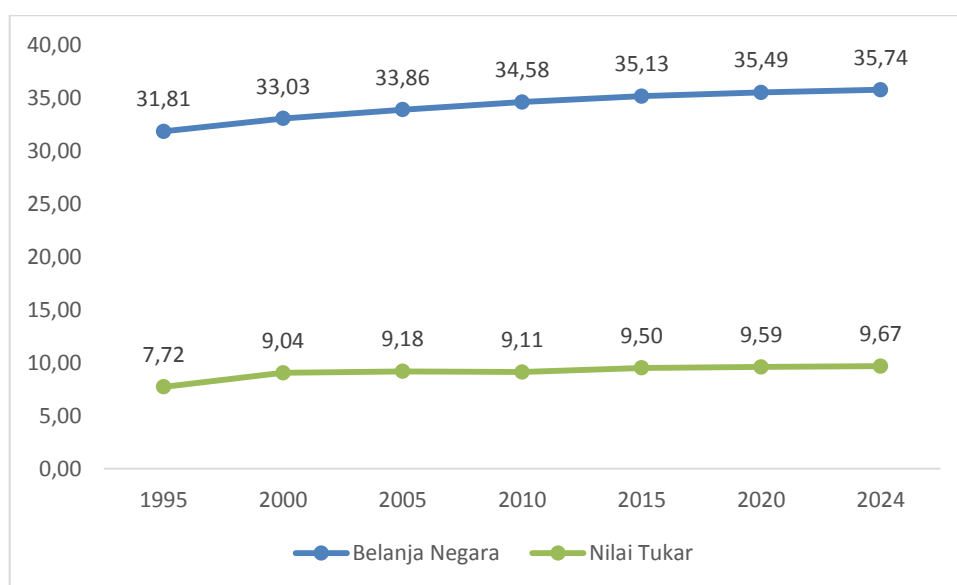
menemukan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh terhadap belanja negara indonesia, yang menunjukkan bahwa perubahan kondisi eksternal dapat memberikan tekanan terhadap posisi fiskal pemerintah.

Nilai tukar merupakan indikator yang menggambarkan nilai suatu mata uang terhadap mata uang asing dan memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi internasional, seperti perdagangan, investasi, serta pembayaran kewajiban luar negeri. Dalam perekonomian indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat menjadi indikator yang sangat penting karena sebagian besar transaksi internasional, termasuk impor energi, pembayaran utang luar negeri, dan investasi asing, menggunakan denominasi dolar amerika serikat.

Perubahan nilai tukar dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek perekonomian, termasuk tingkat inflasi, biaya impor, daya saing perdagangan, serta kondisi fiskal pemerintah. Ketika nilai rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar amerika serikat, biaya impor menjadi lebih mahal sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan memperbesar kebutuhan pengeluaran pemerintah, terutama untuk subsidi energi serta pembayaran kewajiban luar negeri dalam mata uang asing (prasada & pangestuti, 2022).

Selain itu, berdasarkan pendekatan *mundell-fleming* model dalam tenderere (2021), stabilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor penting bagi negara berkembang dengan sistem ekonomi terbuka seperti indonesia. Teori tersebut menjelaskan bahwa ketika terjadi guncangan eksternal, seperti peningkatan suku bunga the fed atau kenaikan harga minyak dunia, nilai tukar menjadi salah satu variabel yang mengalami tekanan terlebih dahulu melalui

mekanisme perpindahan arus modal internasional. Dengan demikian, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat memiliki keterkaitan dengan kondisi fiskal indonesia karena dapat memengaruhi biaya impor, pembayaran utang luar negeri, serta kebutuhan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Berikut disajikan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat dan belanja negara.



Gambar 1. 4 Belanja Negara Ln(Miliar Rupiah) dan Nilai Tukar Ln(Rp/US\$)

Berdasarkan Gambar 1.4, perkembangan belanja negara dan pertumbuhan nilai tukar selama periode 1995–2024 memperlihatkan pola yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1995, belanja negara tercatat sebesar 31,81, sedangkan pertumbuhan nilai tukar berada pada angka 7,72 persen. Pada periode tersebut, pergerakan rupiah relatif terkendali karena Indonesia masih menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*). Kondisi tersebut menyebabkan tekanan terhadap anggaran

pemerintah yang berasal dari kewajiban luar negeri maupun kebutuhan impor masih relatif terbatas.

Pada tahun 2000, belanja negara mengalami peningkatan menjadi 33,03, sementara pertumbuhan nilai tukar meningkat menjadi 9,04 persen. Peningkatan tekanan terhadap nilai tukar tersebut merupakan dampak lanjutan dari krisis keuangan Asia tahun 1997–1998 yang menyebabkan depresiasi rupiah secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar tersebut berdampak terhadap peningkatan biaya pembayaran utang luar negeri pemerintah serta meningkatnya harga barang impor, sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap pengelolaan belanja negara dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2000).

Selanjutnya, pada tahun 2005, belanja negara kembali mengalami peningkatan menjadi 33,86, sedangkan pertumbuhan nilai tukar mencapai 9,18 persen. Pada periode tersebut, pemerintah menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan kenaikan kebutuhan subsidi energi. Selain itu, depresiasi rupiah turut meningkatkan biaya pengadaan minyak impor sehingga semakin memperbesar tekanan terhadap pengeluaran pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2005).

Memasuki tahun 2010, belanja negara meningkat menjadi 34,58, sedangkan pertumbuhan nilai tukar mengalami sedikit penurunan menjadi 9,11 persen. Peningkatan belanja negara pada periode ini berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi nasional setelah terjadinya krisis keuangan global tahun 2008–2009. Sementara itu, kondisi nilai tukar yang relatif lebih stabil memberikan

kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efektif dan terencana (Bank Indonesia, 2010).

Pada tahun 2015, belanja negara kembali meningkat menjadi 35,13, sedangkan pertumbuhan nilai tukar mengalami kenaikan menjadi 9,50 persen. Pelemahan rupiah pada periode tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat melalui kenaikan suku bunga *The Fed*. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia, yang kemudian berdampak terhadap peningkatan biaya impor dan kewajiban luar negeri pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap meningkatkan belanja negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program prioritas nasional (Reuters, 2015).

Pada tahun 2020, belanja negara mengalami peningkatan menjadi 35,49, sementara pertumbuhan nilai tukar meningkat menjadi 9,59 persen. Tekanan terhadap nilai tukar terjadi akibat meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja untuk membiayai kebutuhan kesehatan, bantuan sosial, serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kondisi tersebut menyebabkan belanja negara tetap meningkat meskipun nilai tukar rupiah mengalami tekanan (Bank Indonesia, 2020).

Pada tahun 2024, belanja negara kembali mengalami peningkatan menjadi 35,74, sedangkan pertumbuhan nilai tukar mencapai 9,67 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah masih berlangsung akibat

pengaruh kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat dan ketidakpastian ekonomi global. Meskipun menghadapi tekanan eksternal, pemerintah tetap meningkatkan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan serta menjaga stabilitas perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2024).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki keterkaitan dengan kondisi fiskal Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa informasi mengenai perkembangan setelah tahun 2024 hanya digunakan sebagai gambaran tambahan mengenai kondisi ekonomi terkini. Data setelah periode penelitian tidak termasuk dalam sampel penelitian dan tidak digunakan dalam proses estimasi model yang menganalisis hubungan antarvariabel selama periode 1995–2024.

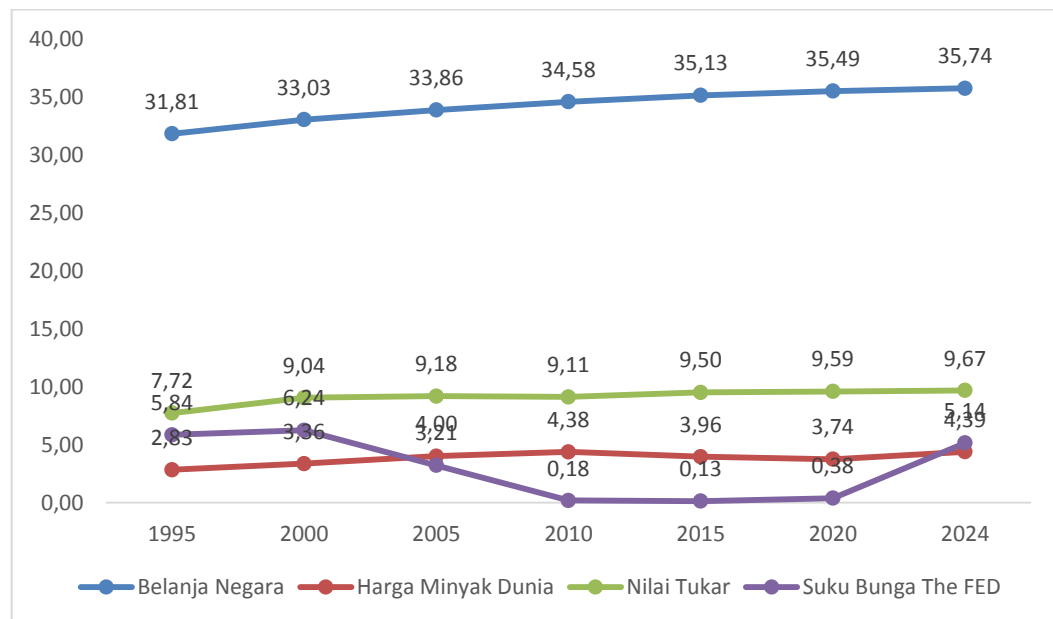
Sebagai gambaran mengenai kondisi setelah periode penelitian, laporan Reuters (2026) menyebutkan bahwa nilai tukar rupiah mengalami tekanan hingga mencapai sekitar Rp17.445 per dolar AS akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan kebijakan suku bunga tinggi *The Fed*. Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia melakukan langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar valuta asing. Pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor serta memberikan tekanan terhadap APBN, terutama melalui peningkatan nilai pembayaran utang luar negeri pemerintah dan komponen belanja yang berkaitan dengan harga komoditas internasional.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui penerbitan Panda Bond sebagai salah satu strategi untuk mengurangi

ketergantungan terhadap sumber pembiayaan berbasis dolar Amerika Serikat. Panda Bond merupakan instrumen surat utang yang diterbitkan di pasar keuangan Tiongkok dengan denominasi mata uang yuan atau renminbi. Instrumen tersebut menjadi alternatif karena pasar obligasi Tiongkok memiliki tingkat likuiditas yang besar serta menawarkan biaya pembiayaan yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 2,3–2,5 persen. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas sumber pembiayaan dan mengurangi risiko akibat volatilitas nilai tukar serta ketidakpastian ekonomi global (Antara News, 2026).

Dengan demikian, perkembangan ekonomi setelah tahun 2024 hanya berfungsi sebagai konteks tambahan untuk menunjukkan bahwa tekanan nilai tukar dan faktor eksternal global masih menjadi isu penting dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Peristiwa tersebut tidak termasuk dalam periode observasi penelitian, tidak digunakan dalam estimasi model ARDL, serta tidak menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai hubungan antara nilai tukar, harga minyak dunia, suku bunga *The Fed*, dan belanja negara selama periode 1995–2024.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut disajikan perkembangan data Belanja Negara, Harga Minyak Dunia, Suku Bunga *The Fed*, dan Nilai Tukar.



Gambar 1. 5 Belanja Negara LM(Miliar Rupiah), Harga Minyak Ln(US\$/Barel), Suku Bunga *The Fed* (Persen), Nilai Tukar Ln(Rp/US\$)
Sumber: Badan Pusat Statistik, U.S Energy Information Administration, FRED, World Bank

Berdasarkan Gambar 1.5, perkembangan belanja negara, pertumbuhan harga minyak dunia, suku bunga *The Fed*, dan pertumbuhan nilai tukar selama periode 1995–2024 menunjukkan pola yang mengalami fluktuasi. Belanja negara mengalami kecenderungan peningkatan dari 31,81 pada tahun 1995 menjadi 35,74 pada tahun 2024. Pada periode tertentu, belanja negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti pada tahun 2005 yang mencapai 33,86, kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 35,49 sebagai respons terhadap kondisi pandemi COVID-19, sebelum mencapai 35,74 pada tahun 2024.

Sementara itu, harga minyak dunia menunjukkan pergerakan yang tidak stabil dengan kisaran pertumbuhan antara 2,83 hingga 4,39 selama periode penelitian. Perubahan harga minyak dunia tersebut mencerminkan adanya pengaruh dinamika pasar energi global terhadap kondisi ekonomi domestik. Di

sisi lain, suku bunga *The Fed* menunjukkan pola penurunan dari 5,84 persen pada tahun 1995 hingga mencapai titik terendah sebesar 0,13 persen pada tahun 2015, kemudian kembali mengalami peningkatan hingga 5,14 persen pada tahun 2024 sebagai respons terhadap peningkatan inflasi global. Adapun nilai tukar rupiah menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan dari 7,72 pada tahun 1995 menjadi 9,67 pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya tekanan depresiasi terhadap mata uang domestik dalam jangka panjang.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai pengaruh faktor eksternal global terhadap belanja negara Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kerentanan fiskal Indonesia terhadap berbagai bentuk guncangan eksternal, khususnya yang berasal dari perubahan harga minyak dunia, kebijakan moneter Amerika Serikat melalui suku bunga *The Fed*, serta dinamika nilai tukar rupiah.

Selama periode 1995–2024, posisi Indonesia dalam sektor energi mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu dari negara yang sebelumnya pernah menjadi eksportir minyak menjadi negara yang memiliki ketergantungan sebagai net importir minyak. Perubahan posisi tersebut menyebabkan dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal Indonesia mengalami perbedaan antarperiode. Ketika Indonesia masih berada dalam posisi sebagai eksportir minyak, peningkatan harga minyak dunia berpotensi memberikan keuntungan melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor migas. Namun, setelah menjadi negara pengimpor minyak, kenaikan harga minyak internasional justru dapat meningkatkan biaya impor energi dan memberikan tekanan terhadap

pengeluaran pemerintah, terutama melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi.

Selain harga minyak dunia, perubahan suku bunga *the fed* dan nilai tukar rupiah juga memiliki keterkaitan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Peningkatan suku bunga global dapat memengaruhi arus modal internasional, sementara pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri serta biaya pengadaan barang impor pemerintah. Oleh karena itu, perubahan posisi Indonesia dalam pasar minyak global dan dinamika faktor eksternal lainnya menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis hubungan antara guncangan global dan belanja negara.

Apabila hubungan antara faktor eksternal tersebut tidak dianalisis secara mendalam, pemerintah dapat menghadapi risiko keterlambatan dalam merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap perubahan kondisi global. Tekanan berupa pelemahan nilai tukar, peningkatan harga minyak dunia, maupun kenaikan suku bunga internasional dapat memperbesar tekanan inflasi, meningkatkan kebutuhan belanja pemerintah, serta mempersempit ruang fiskal dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan bukti empiris mengenai mekanisme transmisi guncangan global terhadap belanja negara Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara faktor eksternal dan kondisi fiskal pemerintah. Penelitian Fridana (2023) yang berjudul *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APBN Periode 1999–2020”* menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap APBN. Namun, penelitian tersebut menggunakan ukuran fiskal yang lebih umum, sehingga belum secara khusus menjelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap komponen belanja negara.

Selanjutnya, penelitian Raouf (2021) dengan judul *“Oil Prices Shocks and Government Expenditure”* menganalisis pengaruh guncangan harga minyak terhadap pengeluaran pemerintah pada negara eksportir dan importir minyak menggunakan metode Vector Autoregression (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga minyak memberikan pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, tetapi responsnya berbeda antara negara eksportir dan negara pengimpor minyak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara harga minyak dan belanja pemerintah sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktur ekonomi suatu negara.

Penelitian Primasari Fitria et al. (2025) yang berjudul *“Pengaruh Harga Minyak Dunia dan Belanja Infrastruktur terhadap Keseimbangan Anggaran Pemerintah Indonesia 2015–2024”* menggunakan metode kuantitatif dan menemukan bahwa harga minyak dunia memiliki pengaruh terhadap keseimbangan anggaran pemerintah Indonesia. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini, baik dari sisi variabel dependen

maupun cakupan waktu penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada keseimbangan anggaran selama periode 2015–2024, sedangkan penelitian ini menganalisis pengaruh harga minyak dunia, suku bunga The Fed, dan nilai tukar terhadap belanja negara dengan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu 1995–2024.

Selain itu, penelitian Axellina dan Fansurullah (2026) melalui kajian berjudul *“Revisiting the Inflationary Impact of Fuel Subsidies: Insights from Indonesia's Exposure to Global Oil Price and Exchange Rate Risks”* menunjukkan bahwa harga minyak dunia dan nilai tukar merupakan faktor penting yang memengaruhi kebijakan subsidi energi di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi serta memperbesar beban fiskal pemerintah.

Penelitian Choi et al. (2019) yang berjudul *“International Fiscal-financial Spillovers: The Effect of Fiscal Shocks on Cross-border Bank Lending”* menggunakan metode *local projections* dengan data lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kondisi fiskal suatu negara dapat memberikan dampak terhadap hubungan keuangan internasional, sementara kondisi moneter global, termasuk perubahan Federal Funds Rate, turut memengaruhi mekanisme transmisi antara kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Sementara itu, penelitian Corsetti et al. (2015) dalam kajian *“Government Spending, Monetary Policy, and the Real Exchange Rate”* menjelaskan bahwa nilai tukar memiliki hubungan yang erat dengan pengeluaran pemerintah.

Depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor, memperbesar pembayaran kewajiban luar negeri, serta memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas kebijakan fiskal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Pertama, penelitian sebelumnya masih menggunakan indikator fiskal yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menganalisis APBN secara keseluruhan atau keseimbangan anggaran, sementara penelitian ini secara khusus menggunakan belanja negara sebagai variabel dependen. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh faktor eksternal terhadap belanja negara masih perlu dikaji lebih mendalam.

Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menganalisis pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar secara terpisah terhadap kondisi fiskal. Sementara itu, penelitian yang menguji pengaruh beberapa faktor eksternal secara simultan, khususnya harga minyak dunia, suku bunga *the fed*, dan nilai tukar terhadap belanja negara Indonesia, masih relatif terbatas.

Ketiga, pengaruh suku bunga *the fed* terhadap belanja negara Indonesia masih belum banyak dikaji secara langsung. Padahal, perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat dapat memengaruhi kondisi fiskal Indonesia melalui beberapa saluran, seperti perubahan arus modal global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, peningkatan biaya pembiayaan pemerintah, serta perubahan kondisi keuangan *internasional*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan

kontribusi dengan menganalisis pengaruh harga minyak dunia, suku bunga *the fed*, dan nilai tukar terhadap belanja negara Indonesia secara simultan menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antarvariabel.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Harga Minyak Dunia, Suku Bunga *The Fed*, dan Nilai Tukar terhadap Belanja Negara di Indonesia.**”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh harga minyak dunia terhadap belanja negara di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka Panjang?
2. Bagaimana pengaruh suku bunga *the fed* terhadap belanja negara di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap belanja negara di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, oleh karena itu didapat tujuan dalam dibuatnya penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Mengetahui pengaruh harga minyak dunia terhadap belanja negara di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka Panjang.
2. Mengetahui pengaruh suku bunga *the fed* terhadap belanja negara di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap belanja negara di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang dipaparkan dibawah ini diantaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di harapkan pada hasil penelitian ini yaitu:

1. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi internasional dan ekonomi publik, khususnya mengenai faktor-faktor global yang memengaruhi belanja negara di Indonesia.
2. Mampu memperkaya kajian empiris terkait hubungan antara harga minyak dunia, suku bunga *the fed*, nilai tukar rupiah, dan belanja negara.
3. Sebagai acuan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi makro, keuangan negara, dan ekonomi internasional, terutama yang berkaitan dengan dampak guncangan global terhadap stabilitas fiskal Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan yaitu sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan dasar pertimbangan kebijakan dalam belanja negara sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah guncangan global.
2. Menjadi acuan dalam merumuskan strategi kebijakan fiskal dan moneter melalui pengendalian dampak fluktuasi harga minyak dunia, stabilisasi nilai tukar rupiah, sertaantisipasi perubahan suku bunga *the fed* terhadap kondisi fiskal nasional.
3. Memberikan wawasan kepada pelaku ekonomi dan investor mengenai hubungan variabel ekonomi makro global terhadap ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi Indonesia, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih tepat dan berkelanjutan.